



Hipotesa

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Hipotesa, Vol 2, No. 2, November 2008

ISSN : 0852 - 8977

STIA ALAZKA AMBON

ahab Tuanaya, <i>Problem Reformasi Sistem Kepartaian (Antara</i> eterbukaan Politik dan Stabilitas Pemerintah)	(1 - 15)
a. Latupapua, <i>Wajah Parlemen di Indonesia (Antara Konsolidasi</i> rbatas dan Demokrasi Semu)	(16 - 31)
aklis Hafel, <i>Demokrasi dan Proses Kekuasaan Negara</i>	(32 - 44)
Jen Latuconsina, <i>Antagonisme Hubungan Sipil Militer di Fiji</i> otret Coup d'etat Militer Terhadap Pemerintah Sipil)	(45 - 54)
Hesen Maruapey, <i>Desentralisasi Sektor Kelautan di Maluku</i> potensi, Peluang dan Hambatan Desentralisasi Sektor Kelautan di Maluku) ...	(55 - 65)
rmawati, <i>Illegal Fishing Dalam Otonomi Daerah</i>	(66 - 78)
ngky V. R. Pattimukay, <i>Peranan Administrasi Publik Dalam</i> angunan Sosial Pemberdayaan Masyarakat	(79 - 88)
or. S. Ruhulela, <i>Kajian Program Pemberdayaan Masyarakat</i> abupaten Maluku Tenggara Barat	(89 - 105)
ard Tayl, <i>Agama dan Politik Dalam Demokrasi di Maluku</i>	(106 - 111)
n Tehuayo, <i>Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penurunan Perolehan</i> a PPP Pada Pemilu 2004 di Kota Ambon Provinsi Maluku	(112 - 121)
islau K. Ohoiwutun, <i>Pemanfaatan Peluang-Peluang Ekologi</i> inistrasi Yang Beraspek Alamiah Sebagai Sumber PAD di Desa di Kabupaten Maluku Tenggara	(130 - 141)

antar Editorial
demokratisasi
ebijakan
ualitas SDM

HIPOTESA

JURNAL ILMU – ILMU SOSIAL

DAFTAR ISI

- Wahab Tuanaya, Problem Reformasi Sistem Kepartaian (Antara Keterbukaan Politik dan Stabilitas Pemerintahan)** (1 - 15)
- Ch. Latupapua, Wajah Parlemen Di Indonesia (Antara Konsolidasi Terbatas dan Demokrasi Semu)** (16 - 31)
- Muhlis hafel, Demokrasi Dan Proses Kekuasaan Negara** (32 - 44)
- M. Jen Latuconsina, Antagonisme Hubungan Sipil Militer Di Fiji (Potret Coup d'etat Militer Terhadap Pemerintahan Sipil)** (45 - 54)
- M. Husein Maruapey, Desentralisasi Sektor Kelautan di Maluku (Potensi, Peluang dan Hambatan Desentralisasi Sektor Kelautan di Maluku)** (55 - 65)
- Normawati, Illegal Fishing dalam Otonomi Daerah** (66 - 78)
- Hengky V. R. Pattimukay, Peranan Administrasi Publik Dalam Pembangunan Sosial Pemberdayaan Masyarakat** (79 - 88)
- Victor. S. Ruhunlela, Kajian Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat** (89 - 105)
- Leonard Tayl, Agama Dan Politik Dalam Demokrasi Di Maluku** (106 - 111)
- Johan Tehuayo, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penurunan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 2004 Di Kota Ambon Propinsi Maluku** (112 - 129)
- Stanislaus k. Ohoiwutun, Pemanfaatan Peluang-Peluang Ekologi Administrasi Yang Beraspek Alamiah Sebagai Sumber PAD Di Desa Debut Kabupaten Maluku Tenggara** (130 - 142)
- Pengantar Editorial**
Isu Demokratisasi
Isu Kebijakan
Isu Kualitas SDM

ABSTRAKSI
 DEMOKRASI DAN PROSES KEKUASAAN NEGARA
 OLEH
 MUHLIS HAFEL

ABSTRAKSI

Demokrasi menganut prinsip-prinsip dasar yang sama. Prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi tersebut adalah prinsip persamaan, hormat terhadap nilai-nilai leluhur, hormat terhadap hak-hak sipil dan kebebasan yang bertanggung jawab serta *play*. Namun harus diakui bahwa konsep demokrasi yang berbeda pada setiap negara pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi obyektif bangsa dan negara itu sendiri, dalam hal ini nilai-nilai lokal dan nasional yang dimiliki setiap bangsa dan negara. Sehingga upaya pelaksanaan demokrasi dapat berlaku sama kepada semua warga Negara.

Yang dikatakan masyarakat demokrasi ialah masyarakat yang berupaya untuk meminimalisir konsekuensi-konsekuensi perbedaan alamiah ini dengan menolong yang lemah agar menjadi lebih kuat. Tidak layak bagi seseorang yang mengklaim dirinya sebagai seorang demokrat, sementara ia gagal mengupayakan terbentuknya kesempatan bagi yang kecil dan lemah untuk menjadi lebih besar dan kuat.

Kunci : Demokrasi, Proses Kekuasaan dan Negara

Abstrak

Model serta konsep demokrasi pada hakekatnya telah didengungkan pada zaman Yunani lebih dari 2500 tahun silam, demikian kata Robert A. Dahl. Walaupun sebagian besar Amerika memandang bahwa demokrasi sebenarnya baru ada sekitar 200 tahun yang lalu. Perkembangan demokrasi setelah dicanangkan di Yunani Kuno kemudian keluar dari Yunani dan merambat sampai dibelahan bumi ini sebenarnya perkembangan bangsa demokrasi mengalami pasang surut yang luar biasa. Demokrasi telah dijadikan konsep atau sistem, sekan-akan mengalami perkembangan akhir-akhir ini sangat luar biasa, walaupun kadang berbenturan dengan ideologi tertentu yang anti demokrasi. Akhirnya tak dari gelombang demokrasi dunia semakin bersinar ketika angin politik dunia berubah secara drastis, ketika rezim komunis tumbang kemudian disertai dengan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, pecahnya Uni Soviet menjadi berbagai negara yang merdeka dan munculnya Pakta Warsawa sebagai monumen kekuasaan blok timur. Gelombang demokrasi semakin membesar dan telah mengarungi semua samudera dunia. (Lihat Terapan Demokrasi menurut Heru Nougroho)

Muhlis Hafel, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate

ai, tetapi juga tidak menjelaskan hal ihkwil terkait dengan status dan hak-hak noritas dalam masyarakat. Bahkan konsep semacam ini harus dianggap sebagai p demokrasi yang kontradiksi dengan kepentingan banyak orang, karena dengan salah satu prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu persamaan hak tiap warga negara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan politik bangsanya, semacam ini dikatakan demokrasi diktator mayoritas. Bangsa-bangsa modern ini selalu menggunakan demokrasi dalam tataran pengertian lebih luas dari yang dianggap sempit, yakni pemerintahan dari rakyat. Jadi sistem demokrasi yang istru bukan hanya dari kekuasaan tapi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat ara, yakni terkait dengan penataan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, , perindustrian, kebudayaan dan sektor kehidupan lain.

icermati, penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para penggagas teori dan emokrasi ini, akan ditemukan antara konsep dan implementasi ada perbedaan , walaupun isi dan proses pelaksanaan berbeda-beda, tapi demokrasi menganut insip dasar yang sama. Prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi tersebut adalah prinsip n, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia, hormat terhadap hak-hak sipil dan n yang bertanggung jawab serta *fair play*.

an merupakan persamaan kesempatan bagi semua orang yang berstatus sebagai warga ntuk membangun potensi dirinya, baik itu bersifat intelektualitasnya maupun moral da nya agar mencapai kematangan secara pribadi maupun kematangan yang bersil alam kehidupan bernegara. Sehingga upaya pelaksanaan demokrasi dapat berlaku sar semua warga Negara. Bila dikatakan masyarakat demokrasi ialah masyarakat ya ra untuk meminimalisir konsekwensi-konsekwensi perbedaan alamiah ini den ng yang lemah agar menjadi lebih kuat. Tidak layak bagi seseorang yang mengkl sebagai seorang demokrat, sementara ia gagal mengupayakan terbentuknya kesemp ang kecil dan lemah untuk menjadi lebih besar dan kuat. Dalam masyarakat demok ak sipil dan kebebasan dihormati, serta dijunjung tinggi, karena bagaimanapun uhan akan kebebasan individual dan sosial selalu mendapat tempat yang sentral d upan berbangsa dan bernegara.

in, tetapi juga tidak menjelaskan hal ikwal terkait dengan status dan hak-hak wirtas dalam masyarakat. Bahkan konsep semacam ini harus dianggap sebagai p demokrasi yang kontradiksi dengan kepentingan banyak orang, karena dengan salah satu prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu persamaan hak tiap warga negara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan politik bangsanya, semacam ini dikatakan demokrasi diktator mayoritas. Bangsa-bangsa modern i selalu menggunakan demokrasi dalam tataran pengertian lebih luas dari ang dianggap sempit, yakni pemerintahan dari rakyat. Jadi sistem demokrasi yang itu bukan hanya dari kekuasaan tapi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat ara, yakni terkait dengan penataan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, , perindustrian, kebudayaan dan sektor kehidupan lain.

ormati, penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para penggagas teori dan smokrasi ini, akan ditemukan antara konsep dan implementasi ada perbedaan . walaupun isi dan proses pelaksanaan berbeda-beda, tapi demokrasi menganut insip dasar yang sama. Prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi tersebut adalah prinsip a, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia, hormat terhadap hak-hak sipil dan p yang bertanggung jawab serta *fair play*.

in merupakan persamaan kesempatan bagi semua orang yang berstatus sebagai warga ptak membangun potensi dirinya, baik itu bersifat intelektualitasnya maupun moral dan ya agar mencapai kematangan secara pribadi maupun kematangan yang bersifat iliam kehidupan bernegara. Sehingga upaya pelaksanaan demokrasi dapat berlaku sama semua warga Negara. Bila dikatakan masyarakat demokrasi ialah masyarakat yang a untuk meminimalisir konsekwensi-konsekwensi perbedaan alamiah ini dengan ng yang lemah agar menjadi lebih kuat. Tidak layak bagi seseorang yang mengklaim sebagai seorang demokrat, sementara ia gagal mengupayakan terbentuknya kesempatan ng kecil dan lemah untuk menjadi lebih besar dan kuat. Dalam masyarakat demokratis, k sipil dan kebebasan dihormati, serta dijunjung tinggi, karena bagaimanapun juga an akan kebebasan individual dan sosial selalu mendapat tempat yang sentral dalam an berbangsa dan bernegara.

B. Kajian Teoritik

1. Negara Demokrasi dan Kekuasaan Demokratis *

Uraian tentang demokrasi telah dikemukakan pada penjelasan-penjelasan terdahulu, namun antara pembentukan negara demokratis dan kekuasaan demokratis merupakan konsekuensi dari konsep demokrasi, kemudian diadopsi sebagai suatu konsep dalam bernegara. Ada beberapa hal yang perlu disimak dalam penjelasan tentang konsep demokrasi dalam rangka pembentukan sebuah negara demokrasi.

Edward Shils (New York, Rinhard dan Wisto, 1980 : 402) mengidentifikasi "tiga kualitas demokrasi politik dalam sebuah kekuasaan demokratis, yakni pemerintahan sipil, institusi representatif atau lembaga perwakilan dan kebebasan publik".

Demokrasi mencakup pemerintahan sipil, paling kurang dalam dua pengertian, yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk mencari dan memegang jabatan politik, warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, melalui aktifitas-aktifitas seperti pemungutan suara, terlibat dalam organisasi politik dan kelompok-kelompok kepentingan serta jabatan-jabatan politik yang terkait.

Hak-hak semacam itu merupakan hak pribadi bagi siapa saja, bukan hanya terhadap setiap elit aristokrasi atau kelas-kelas profesional saja yang seharusnya melayani kepentingan-kepentingan publik. Sedangkan seterusnya bahwa keputusan-keputusan politik harus dijustifikasikan secara publik. Sebab pemerintahan negara demokratis itu, didasarkan persetujuan dari rakyat yang diperintah. Bukan pada penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan sebagai mana pemerintahan dilakukan oleh militer diktator atau negara berdasarkan pada sistem kediktatoran dan sejenisnya

Pada prinsipnya kekuasaan demokratis, dalam proses kekuasaannya mencakup pemeliharaan kebebasan-kebebasan publik, dalam arti setiap warga negara memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk berkomunikasi secara bebas, hak untuk berkumpul dan berserikat secara bebas, dan harus dihormati oleh kekuasaan yang mengklaim dirinya sebagai penguasa demokratis.

Dalam negara demokratis, negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipaksakan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama-sama. Kekuasaan demokratis tidak mengenal adanya kekejaman, intimidasi, penipuan serta lde semacamnya.

Hak-hak minoritas mendapat perlakuan sama dengan warga negara mayoritas walaupun dalam konsep kekuasaan demokratis tidak mengenal adanya tirani mayoritas dan tirani minoritas. Sehingga kadang penguasa mendapat kecaman keras secara internal kenegaraan oleh warga negaranya ataupun secara eksternal masyarakat dunia, bila dalam kondisi eksternal termasuk hak-hak rakyatnya diabaikan dalam proses kekuasaan negara.

Penguasa demokratis, dalam menjalankan konsep demokrasinya mencakup institusi-institusi representatif atau lembaga-lembaga perwakilannya. Bahwa otoritas untuk memerintah berasal dari pemilihan oleh rakyat. Dalam masyarakat kompleks, demokrasi diekspresikan dalam perjuangan kompetitif antara para pemegang jabatan atau akan memegang jabatan, setiap orang harus berusaha menemukan dan memelihara dukungan sekurang-kurangnya dengan memperjuangkan kepentingan-kepentingan para pendukung mereka.

Dengan demikian, keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam sebuah kekuasaan demokratis, apabila diterapkan haruslah mencerminkan aspirasi rakyat pendukung mereka serta dapat bermanfaat terhadap seluruh warga negara. Suatu masyarakat demokratis adalah suatu tipe masyarakat yang kultur dominanya dan struktur sosialnya secara langsung atau tidak langsung mendukung proses politik yang demokratis. Untuk menciptakan suasana demokratis maka dalam sebuah kekuasaan demokratis dalam perjalanan pemerintahannya selalu menciptakan kondisi dan suasana melalui mekanisme *bottom-up*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan dan kebijakan harus selalu memperhatikan aspirasi warga negaranya.

Kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan yang demokratis harus selalu didasarkan pada sejauh mana peran aktif masyarakat warganya berpartisipasi dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan publik. Sistem pemerintahan yang dikembangkan dalam negara demokratis harus selalu mencerminkan sebuah usaha yang lebih mengoptimalkan peran warga negara dalam mencermati aktifitas pemerintahan, sehingga terjadi penciptaan suasana yang mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas publik. Konsep *check and balance* dalam sebuah negara yang demokratis adalah sesuatu yang baik dalam pengelolaan pemerintahan negara.

Pemerintah dipandang akan lebih transparan bila konsep *check and balance* itu akan terpelihara dalam suasana bernegara dengan efektif. Bila hal itu tidak terjadi maka itu

indikator sebagai pelaksanaan pemerintahan dalam negara tidak demokratis sebagaimana yang diinginkan, bahwa sebuah negara yang mengklaim 'negara demokratis'. Walaupun kita telah pulunni bahwa sistem demokrasi tidak merupakan suatu konsep yang terbaik dari konsep sistem selain demokrasi. (Affan Gafar)

2. *Kekuasaan Dalam Gerakan Demokrasi*

Prinsipnya kekuasaan melekat secara inheren pada diri manusia sebagai umma kehadiran manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bermasyarakat atau manusia politik. Manusia secara hakikatiah mempunyai nafsu untuk berkuasa, paling tidak seseorang itu menjadi penguasa terhadap dirinya sendiri, keluarga bahkan terhadap sebuah organisasi yang sederhana bahkan sampai manusia dapat berkuasa di tingkat negara sekalipun. Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok orang lain dalam interaksinya, sehingga hasil dari interaksi yang telah dilakukan secara efektif dapat menimbulkan hasil sesuai dengan tujuan dan keinginan yang terdapat pada orang atau sekelompok orang yang melaksanakan kekuasaannya tersebut. Kekuasaan merupakan gejala masyarakat yang muncul dari berbagai bentuk yang bersifat kondusif dalam kehidupan manusia secara menyeluruh.

Kekuasaan diformat melalui adanya pola hubungan yang memegang peran sebagai subyek dengan memerintah dan ada yang berposisi sebagai obyek kekuasaan atau merel yang diperintah atau sering diistilahkan sebagai pola hubungan *the ruler and the ruled*. Dengan demikian maka, terdapat pihak yang memegang posisi perintah, sedangkan pihak lain terdapat pihak yang tunduk dan berposisi sebagai pihak yang taat sebagai interaksi antara kedua pihak yang melakukan pola hubungan kekuasaan itu. Pola hubungan seperti ini, kesejajaran menjadi terpinggirkan, karena ada pihak yang di atas peran dan ada pihak yang berposisi di bawah peran dan bahkan ada pihak lain ya posisinya lebih dibawah lagi. Sehingga terdapat khirakhi kekuasaan sampai pada t akhir pihak yang memang berada diposisi paling terendah.

Kekuasaan selalu dilihat sebagai gejala, sering ditemui dalam suasana proses politik walaupun antara para ilmuwan politik, selama ini tidak memiliki kesepakatan tentang arti dan makna dari kekuasaan itu secara paten, bahkan semakin tidak jelas dalam pemakna

terhadap konsep kekuasaan, oleh karenanya sebagian para ahli itu menganjurkan agar konsep tentang kekuasaan itu ditanggalkan.

Menurut Robson dalam SP. Varma bukunya *Modern Political Theory* (1982) Kekuasaan adalah usaha dan perjuangan yang dilakukan orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain atau mereka yang menentang keinginannya agar secara sukarela atau secara paksa dapat memberikan respon positif bagi keinginan dan tujuannya.

Sedangkan Ossip. K. Flechtheim (1952) menyatakan bahwa pada dasarnya "kekuasaan sosial itu berupa suatu interaksi yang mengarah pada total kemampuan diri dari sekelompok orang dalam hubungan-hubungannya dari proses-prosesnya dengan menghasilkan suatu ketaatan dari pihak lain secara aman dan mencapai sasaran tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh si pemegang kekuasaan."

Kekuasaan pada dasarnya mempunyai sumber yakni berdasarkan kedudukan seseorang baik secara formal maupun secara non-formal. Sumber kekuasaan berkedudukan secara formal maupun informal terdapat pada kedudukan secara organisasional publik karena mendapat pengakuan secara legal.

Sementara itu, untuk mengomentari kekuasaan politik, maka orang selalu mengingat tentang Machiavelli, walaupun kekuasaan politik itu dibangun jauh sebelum jaman Machiavelli. Ia seringkali disebut sebagai "bapak politik kekuasaan". Walaupun pengertian dan definisi kekuasaan politik sesungguhnya tidak dapat distandarisasi oleh ahli ilmu politik, namun Machiavelli memberikan pengertian tentang kekuasaan politik, menurutnya bahwa kekuasaan politik adalah bagi mereka yang mempunyai ketrampilan untuk meraihnya dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankannya.

Sedangkan Charles Merriam, sangat mengalami kesulitan untuk menjelaskan perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan atau otoritas, menurutnya kekuasaan merupakan alat pemaksa dan mempunyai akibat fisik, otoritas juga dapat didasarkan atas persetujuan dan masih lebih efektif.

Rumitnya membedakan antara kekuasaan dan wewenang ini maka untuk menjelaskan hal seperti itu harus selalu menggunakan pendekatan secara sosiologis. Untuk membedakan antara kekuasaan dan wewenang maka dalam pendekatan sosiologi dijelaskan bahwa kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai

dukungan atau mendapat pengakuan dalam masyarakat. Sedangkan kaum realis modern memandang bahwa politik merupakan usaha yang dilakukan untuk mengejar kekuasaan dan tatanan sosial sepenuhnya sebagai hasil dari ancaman-ancaman yang mungkin dipertimbangkan secara tidak seimbang.

Manifestasi dari pendekatan kekuasaan maka akan dikenal adanya kekuasaan yang berlebihan atau *power over* yaitu kekuasaan diartikan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang memiliki kemampuan untuk mengatur tindakan orang lain. Sedangkan kekuasaan bersifat terbatas atau *power to* yaitu mengacu pada kekuasaan sebagai kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan.

Terdapat enam konsep dalam pandangan ilmu politik, berkaitan dengan konsep kekuasaan, seperti pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercion*, *force* dan *authority* atau kewenangan.

Keenam konsep ini, merupakan bentuk-bentuk kekuasaan yang memiliki perbedaan, selanjutnya akan dijelaskan : *Influence*, ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. *Persuasion*, ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumen untuk melakukan sesuatu. *Manipulasi* adalah penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya, sebenarnya memenuhi keinginan penguasa. *Coercion* ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan, dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar sikap dan berperilaku yang bertentangan dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi. *Force* ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, maupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain untuk melakukan suatu. *Authority* ialah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Wajah Demokrasi Dalam Perspektif Partisipasi Politik.

Partisipasi politik sangat ditentukan oleh warga negaranya. Partisipasi politik adalah kutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan, yang berkaitan dengan kehidupannya dalam negara. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah partisipasi, orang paling tahu tentang yang paling baik terhadap dirinya adalah orang itu sendiri, karena keputusan politik

yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan keputusan politik."

Dari pandangan seperti di atas maka dapat dibedakan antara perilaku politik dan partisipasi politik. Telah dijelaskan bahwa yang melakukan kegiatan politik adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan pemerintahan, Pemerintah yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan warga negara biasa tidak sama sekali memiliki kewenangan terhadap hal itu.

Dalam tataran praktis, partisipasi politik bisa muncul dalam beberapa bentuk, setiap bentuk partisipasi politik akan berisikan gaya, tuntutan, pelaku dan sampai pada tindakan-tindakan yang dilakukan warga negara dalam konteks perpolitikan. Disamping juga berkaitan dengan jumlah warga negara yang terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi politik, tidak harus selalu dilakukan oleh sekelompok orang tetapi juga boleh dilakukan secara individual.

Terkaitan penjelasan partisipasi politik, oleh Huntington dan Nelson melakukan riset-riset, mereka dapat menemukan lima bentuk aktifitas utama yang telah dipraktekan dalam partisipasi politik. Bentuk-bentuk itu masing-masing memiliki tindakan dan pelaku yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses-proses politik, adalah :

(1). *Kegiatan pemilihan*, mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. (2). *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka, mengenai permasalahan menyangkut orang banyak. (3). *Kegiatan organisasi*, menyangkut partisipasi sebagai anggota, atau pejabat dalam sebuah organisasi, tujuan utamanya secara eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. (4). *Mencari Koneksi (contacting)*, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintahan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. (5). *Tindakan Kekerasan (violence)*, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan

Yakni dimulai proses politisasinya, partisipasi politik, di negara-negara yang cenderung sistem demokrasi dalam perpolitikannya, maka warga negara memiliki hak dan itu, tetapi kadang dalam politisasinya, kenyataan menunjukkan, persentase warga yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Mengapa terjadi seperti ini. Kasus tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Kaitannya pada masalah ini, pertanyaan yang kemudian muncul bagaimana seseorang itu berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik. Faktor apa yang dianggap dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Dapat dijelaskan bahwa pengaruh kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Dapat dijelaskan pula konsep yang dikaitkan dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban bagi warga negara. Sedangkan sikap dari kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah pemerintah tersebut dapat dipercaya, pengaruh atau tidak dalam hal kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah.

Untuk partisipasi seseorang dalam politik ini, apabila seseorang memiliki kesadaran akan hak dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sebaliknya apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif dan tertekan atau apatis. Sedangkan berupa militan dikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Ketika kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi seperti ini disebut pasif. Tinggi rendahnya faktor-faktor itu sangat tergantung pada status ekonomi, status sosial, afiliasi politik orang tua dan pengalaman organisasi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena pendidikan, ketarunaan dan bakat pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan.

kesimpulan

dari historis, kehidupan manusia telah menunjukkan suatu kecenderungan yang pasti untuk orang-orang di dunia baik secara terpisah, maupun secara bersama-sama memiliki nilai atau tujuan-tujuan mereka. Kedaulatan tersebut harus mempunyai ikatan-ikatan yang dalam suatu wadah yang memiliki kekuasaan.

orang-orang dan kesatuan tersebut dipandang memiliki peluang untuk menampung segala keinginan tentang keselamatan dan jiwa kemanusiaan, serta dapat memberikan

kesempatan untuk memahami diri manusia itu sebagai makhluk berdaulat dan memiliki kedaulatan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama manusia lain dalam suatu arena kekuasaan demokratis.

Walaupun demikian setelah demokrasi menglobal, persoalan yang timbul kemudian adalah bagaimana memahami sistem politik demokrasi tersebut. Sebab telah terjadi berbagai bentuk perubahan sepanjang waktu sehingga memunculkan sejumlah pertanyaan, apakah demokrasi dianggap suatu konsep yang sejati. Persyaratan-persyaratan seperti apa yang harus dipenuhi agar suatu kekuasaan disebut kekuasaan demokratis.

Dalam kekuasaan politik tidak hanya bergantung pemilihan sumber-sumber daya yang ada, baik kekuasaan politik juga berkaitan dengan metode-metode pendayagunaan sumberdaya cara efektif untuk memperoleh keputusan.

Kekuasaan adalah suatu bentuk hubungan sangat kompleks, memiliki sejumlah dimensi, yakni penggunaan kekuasaan dapat mendayagunakan sejumlah sumberdaya untuk memperoleh putusan orang lain. Hal yang masih membutuhkan analisis kita terhadap bentuk kekuasaan demokratis adalah antara kekuasaan demokratis dalam tataran normatif dan tataran praktis. Hal pengalamannya membuktikan setiap penguasa selalu mengklaim dirinya sebagai penguasa demokratis, tapi realita membuktikan dalam implementasinya, selalu terjadi gap antara agni dan kenyataan. Apakah ini sebagai wujud dari hegemoni penguasa lebih besar dari pada negara karena didasarkan pada interest dari penguasa. Karena secara normatif negara adalah suatu wadah formal, tapi peran negara sangat diwarnai oleh peran penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alber, Norman P. *An Introduction to Modern Political Theory*. London, Macmillan, 1989.
- Adharyo, Miran. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia pustaka Utama, 1993.
- Alber, A. Robert. *On Democracy*. London, Yale University Press, 1999.
- _____. *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*. New Haven and London, Yale University Press, 1982.
- Amriyandani, Dedu. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang, UMM Press, 2002.
- Al-Jawab, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Amriyandani, Red. *1 Political Science Scope and Theory*. USA, Addison Wesley, 1973.

Greene, H. Thomas, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta, Grafindo Persada, 2000
Harc, Peter, *Foundations of Political Science*. London, Harcourt, 1996
Huntington, Samuel P., *Tumbuh Politik di Dalam masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta, Rajawali, 1983
Held, David, *Democracy and the Global Order*. Grand Britain, Polity Press, 1993
Marsa, Jafar Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Remaja Cipta, 2001
Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial Dan Perubahan Politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
Mas'ud, Miftar, *Keajaiban Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
Molgan, Geoff, *Politik Dalam Sebuah Era Baru*. Jakarta, Yayasan OB, 1994
Schuman, Henry J., *Filosof Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
Sudarto, Ramdan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Grafindo, 1992
Varma, SP, *Teori Politik Modern*. Jakarta, Rupa Grafindo Persada, 2004